

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban



TAHUN 2020

 www.dishub.tanjabbarkab.go.id

 (0742) 7351069

1. Urusan Perhubungan; Dinas Perhubungan

Tabel 3.16.
Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2020

KO DE	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1		Program pelayanan Administrasi Perkantoran					
1		Penyediaan jasa surat menyurat	100 %	100 %	Tidak Ada Permasalahan	-	-
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	100 %	Tidak Ada Permasalahan	-	-
5		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	8 Unit	8 Unit	Tidak Ada Permasalahan	-	-
7		Penyediaan jasa administrasi keuangan	19 Orang	19 Orang	Tidak Ada Permasalahan	-	-
8		Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Permasalahan	-	-
10		Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Permasalahan	-	-
11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Permasalahan	-	-
12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Permasalahan	-	-
15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Permasalahan	-	-
17		Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Permasalahan	-	-
18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	67 Kali	67 Kali	Tidak Ada Permasalahan	-	-
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
12		Pengadaan peralatan Gedung Kantor	7 Unit	7 Unit	Tidak Ada Permasalahan	-	-
20		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 Unit	2 Unit	Tidak Ada Permasalahan	-	-
22		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	32 Unit	32 Unit	Tidak Ada Permasalahan	-	-
26		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	54 Unit	54 Unit	Tidak Ada Permasalahan	-	-
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
2		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	125 orang	125 orang	Tidak Ada Permasalahan	-	-
6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					

1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	80 laporan	80 laporan	Tidak Ada Permasalahan	-	-
16	Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					
1		Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	7 Paket	7 Paket	Tidak Ada Permasalahan	-	-
17		Program peningkatan pelayanan angkutan				-	-
1		Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut, Sungai Dan Penyeberangan	2 Lokasi	2 Lokasi	Tidak Ada Permasalahan	-	-
2		Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	4 Lokasi	4 Lokasi	Tidak Ada Permasalahan	-	-
3		Penciptaan Keamanan Dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan Terminal	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan	-	-
4		Penciptaan Keamanan Dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan pelabuhan sungai dan penyebrangan	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan	-	-
5		Posko Pengamanan Hari Hari Besar Nasional dan Daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Tidak Ada Permasalahan	-	-
20	Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.	Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor		0%	Terhitung Bulan April 2020 Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Tidak Lagi Melayani Pengujian Kendaraan Bermotor Karena Tidak Memenuhi Standar Akreditasi Laik Operasi. Hal ini disebabkan karena pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor kekurangan Alat Uji BREAKE TESTER dan BLU E, Dua jenis alat ini merupakan bagian yang harus dipenuhi guna memenuhi standar Akreditasi Laik operasi Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Ditetapkan Oleh Kementerian Perhubungan RI	Pengadaan Alat Uji Break Tester dan Bukti Lulus Uji Elaektronik (BLU E)	-
6		Peningkatan Uji Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	100%	0%			
21		Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas		100%			
3		Operasional Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Permasalahan	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

A. KEBIJAKAN STRATEGIS

NO	PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	DINAS PERHUBUNGAN	Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pada sector darat dan laut.	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan • pp Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan • PP Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan • Permenhub Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan • Permenhub Nomor 39 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang angkutan Penyeberangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe C dan Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM Perhubungan • Terciptanya Tertib Laik Angkutan Lalu Lintas Pada Hari Biasa, Hari Besar Nasional dan Hari Besar Daerah • Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Darat dan Laut • Meningkatkan PAD Pada Sektor Perhubungan
		Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.		

B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2019	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Dinas Perhubungan	PERMASALAHAN IZIN BERLAYAR KAPAL MOTOR GT 7 KE BAWAH AGAR DI SELESAIKAN	Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 18 Ayat 6 Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau di Larang Dilakukan diLaut Kecuali Mendapat Izin SYAHBANDAR dengan tentang memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal.	Izin Berlayar Kapal Motor GT 7 Ke Bawah Merupakan Kewenangan KSOP